

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, persaingan antar perusahaan berlangsung dengan ketat. Untuk itu dituntut bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya secara efektif, efisien dan ekonomis untuk tetap mempertahankan eksistensinya sekaligus menghindari fenomena kecurangan-kecurangan yang terjadi. kecurangan-kecurangan itu berupa, kecurangan laporan keuangan pada kasus PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkan pada tahun 2005, perusahaan mengumumkan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 6,90 milyar, namun setelah hasil audit diteliti dengan seksama perusahaan seharusnya dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp 63 milyar. Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Dalam laporan keuangan tersebut pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Seharusnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, pajak pihak ketiga tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi dan penyajian laporan keuangan telah terjadi pada kasus ini (Kompas, 2006). Kasus lainnya menimpa salah satu BUMN, yaitu PT. Kimia Farma Tbk yang melakukan mark-up laporan keuangan, yaitu terjadinya penggelembungan laba bersih pada laporan keuangan tahun 2001 sebesar Rp 32,668 miliar. Perusahaan seharusnya menyajikan laba bersih sebesar Rp 99,594 miliar,

namun perusahaan menyajikan laba bersih sebesar Rp 132 miliar. Kecurangan tersebut terungkap karena Bapepam menilai laba yang diperoleh perusahaan terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa sehingga dilakukan audit ulang oleh Bapepam pada laporan keuangan Kimia Farma tahun 2001, hasil audit tersebut menyatakan bahwa perusahaan melakukan overstated penjualan dan persediaan yang mengakibatkan kesalahan penyajian laporan keuangan (Bapepam, 2002). Kasus kecurangan laporan keuangan tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di luar negeri seperti pada perusahaan Enron, Worldcom, Global Crossing, dan Adelphia. Perusahaan tersebut merupakan contoh perusahaan yang bangkrut akibat skandal kecurangan dalam bentuk pencurian aset, kejahatan komputer, korupsi, maupun kesalahan dalam penyajian laporan keuangan (Ilter, 2009).

Menurut Sawyers (2005: 58) pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting sekali dalam pencapaian tujuan usaha. Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap pengendalian intern.

Menurut Mulyadi (2001: 167) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern pada hakekatnya adalah suatu mekanisme yang didesain untuk menjaga (*preventif*), mendeteksi (*detektif*) dan memberikan mekanisme pembetulan (*correctif*) terhadap potensi terjadinya kesalahan (kekeliruan, kelalaian, *error*) maupun penyalahgunaan (kecurangan, *fraud*). Tujuan sistem pengendalian intern yaitu untuk menjamin

kebenaran data akuntansi, untuk mengamankan harta kekayaan dan pembukuannya, untuk menggalakkan efisiensi usaha, untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan.

Ditengah persaingan yang ketat antar perusahaan yang berorientasi pada laba yang besar, Indonesia memiliki bentuk usaha yang memiliki ciri khas perekonomian di Indonesia yaitu koperasi. Dalam hal ini pemerintah Indonesia mengatur bentuk usaha tersebut yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Salah satu bentuk usaha yang melandaskan kegiatannya sebagai ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan mengutamakan pada kemakmuran masyarakat.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat kenaikan sebesar 17,4 persen jumlah unit koperasi dari tahun 2009 yang tercatat sebanyak 170.411 unit menjadi 200.808 unit pada Juli 2013. Sementara dari sisi jumlah keanggotaan, terdapat kenaikan 18,8 persen dari 2009 yang tercatat anggotanya sebanyak 29,2 juta orang bertambah menjadi 34,7 juta orang. Dengan jumlah anggota sebanyak itu, kini volume usaha koperasi di pertengahan 2013 telah mencapai Rp115,2 triliun atau tumbuh *double digit*, 12,09 persen, dari 2012. Kenaikan jumlah, baik dari sisi unit koperasi, jumlah keanggotaan maupun volume usaha, menunjukkan koperasi telah memainkan peranan yang strategis dalam sistem perekonomian nasional. (data diolah dari, <http://economy.okezone.com>)

Data lain menyebutkan dari laporan Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2000-2010 yang dimana terdapat 88.930 koperasi aktif dan 14.147 koperasi yang tidak aktif pada tahun 2000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2001 sebesar 89.756 koperasi yang aktif dan 21.010 koperasi yang tidak aktif. Hal tersebut diakibatkan karena kegiatan operasional tidak berdasarkan prinsip, nilai dan azas koperasi, buruknya manajemen koperasi baik manajemen keuangan maupun manajemen SDM serta minimnya partisipasi anggota akibat kurangnya pendidikan akan perkoperasian. Penyebab yang paling sering dialami koperasi-koperasi Indonesia adalah mengalami kurangnya modal usaha yang juga disebabkan oleh tidak disiplin administratif oleh anggota serta tidak adanya kemitraan yang dijalin oleh koperasi. (data diolah dari <http://ekonomi.kompasiana.com>)

Menurut UU No 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Salah satu aktivitas oprasional yang dapat mempengaruhi besarnya sisa hasil usaha (SHU) adalah penjualan baik dari penjualan tunai maupun kredit, yang nantinya akan menghasilkan laba yang akan dibagikan kepada anggota dalam bentuk SHU. Aktivitas penjualan itu berupa penerimaan pesanan, penegasan pesanan, pengiriman barang, pembuatan faktur, dan pembuatan laporan operasional penjualan. Penjualan tunai adalah penjualan yang transaksi pembayaran dan

pemindahan hak atas barangnya langsung melalui register kas atau bagian kassa. Penjualan kredit merupakan penjualan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut.(Mulyadi,2001: 210)

Sistem penjualan tunai maupun penjualan kredit dapat berjalan dengan baik apabila memiliki unsur-unsur pengendalian yang meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, pemantauan atau monitoring, informasi dan komunikasi.(Warren dkk, 1999: 184)

Untuk mengatasi kecurangan-kecurangan yang terjadi akibat tidak teliti dan tidak tepatnya penetapan, penggolongan, pencatatan pada penjualan tunai dan penjualan kredit maka dibutuhkan prosedur-prosedur pengendalian. Seperti: 1) Pegawai yang kompeten, perputaran tugas dan cuti wajib. 2) Sistem akuntansi yang baik memerlukan prosedur untuk memastikan bahwa para karyawan mampu melaksanakan tugas yang diembannya. 3) pemisahan tanggungjawab untuk operasi yang berkaitan harus dibagi dua orang atau lebih. 4) pemisahan operasi, pengamanan aktiva dan akuntansi.

Di Malang, terdapat 5 koperasi mahasiswa yang aktif yaitu koperasi mahasiswa UMM, koperasi mahasiswa UM, koperasi mahasiswa padang bulan UIN Maliki Malang, koperasi mahasiswa kanjuruhan Malang, dan koperasi mahasiswa Universitas Islam Malang.

Koperasi mahasiswa padang bulan UIN Maliki Malang, sebagai salah satu koperasi mahasiswa yang aktif dilingkungan kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang memiliki unit usaha toserba, foto copy, dan conter pulsa yang sasaran utama konsumennya mahasiswa kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri. Tiap tahun ada sekitar 2000-an mahasiswa baru yang masuk Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan bermukim di Ma'had Universitas yang letaknya tidak jauh dari koperasi mahasiswa padang bulan Uin Maliki Malang.

Koperasi mahasiswa padang bulan UIN Maliki Malang memiliki lokasi strategis karena terletak di bawah perpustakaan di depan parkir kampus dan berada dipusat kampus. Dikarenakan letaknya yang strategis, para konsumen koperasi mahasiswa padang bulan UIN Maliki Malang adalah konsumen yang potensial. Adanya keunggulan koperasi mahasiswa padang bulan UIN Maliki Malang yang memiliki lokasi strategis menyebabkan penjualan barang dagangan di koperasi mahasiswa padang bulan UIN Maliki Malang meningkat di bulan-bulan tertentu. Penjualan perbulan sekitar Rp. 240 juta dan meningkat pada bulan-bulan tertentu seperti bulan penerimaan mahasiswa baru dan bulan permulaan semester. Hal ini menyebabkan sistem pengendalian internal penjualan tunai dan penjualan kredit penting bagi koperasi mahasiswa UIN Maliki Malang.

Penelitian tentang sistem pengendalian internal telah banyak diteliti oleh peneliti lain. Herlina (2013), meneliti tentang sistem pengendalian internal. Dalam penelitian Herlina (2013) dengan judul sistem pengendalian internal penjualan

kredit pada KPRI Universitas Brawijaya Malang, ditemukan adanya terlalu mudahnya pemberian otorisasi atas penjualan kredit dimana penjualan kredit akan terus dilakukan selama piutang anggota belum melebihi batas plafond pinjaman dan lama angsuran pembayaran piutang ditentukan sendiri oleh anggota dengan kebijakan pemberian batasan maksimal 10x angsuran untuk bahan kebutuhan pokok.

Dari fenomena ini peneliti ingin menganalisis aktifitas-aktifitas bisnis operasional yang ada guna untuk menganalisis sistem pengendalian internal penjualan tunai dan penjualan kredit untuk dapat digunakan koperasi tersebut dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, dimana kegiatan tersebut selalu membutuhkan pengendalian internal. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Penjualan Tunai dan Penjualan Kredit pada Koperasi Mahasiswa UIN Maliki Malang”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- Bagaimanakah implementasi sistem pengendalian internal pada sistem penjualan tunai dan penjualan kredit di Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maliki Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah :

- Untuk menganalisis sistem pengendalian internal khususnya pada sistem penjualan tunai dan penjualan kredit yang diterapkan pada Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maliki Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis
 - Mengembangkan kreatifitas mahasiswa dalam menganalisis pada suatu kasus.
 - Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan ide dalam praktik dunia kerja dan membandingkannya dengan teori-teri yang didapat dalam perkuliahan.
 - Sebagai pengetahuan tentang implementasi teori sistem mengenai SPI di Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maliki Malang.
- Manfaat Praktis
 - Sebagai masukan dan saran bagi Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maliki Malang guna penyempurnaan sistem pengendalian internal khususnya pada sistem penjualan tunai dan penjualan tunai.
 - Mengetahui hambatan-hambatan penerapan SIA dalam Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maliki Malang.